

Self Assessment System ini diharapkan akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan negara. Upaya, peran, dan sikap proaktif wajib pajak yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya juga dapat membantu tercapainya harapan tersebut. Dengan adanya *Self Assessment System* secara tidak langsung mewajibkan pelapor mengetahui apa saja komponen yang masuk dalam pelaporan pajak. Namun, masyarakat merasa tertekan dengan sistem ini karena harus mendaftar sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT, menghitung pajak terutang, dan memenuhi kewajibannya. Selain itu, masyarakat masih kurang memahami proses-proses yang terlibat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ini ialah kelemahan dalam *Self Assessment System* yang menyebabkan masyarakat kurang giat dalam memenuhi semua kewajibannya. Pembentukan SP2DK terkadang disebabkan oleh kelemahan *Self Assessment System* yang mengakibatkan wajib pajak tidak memenuhi tanggung jawab pelaporannya sesuai peraturan yang berlaku dan otoritas pajak menemukan adanya dugaan kurang lapor atau kurang bayar.

CV. Prema Desain merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengujian tanah (*soil test*), yang beralamat di Jl. Gn Andakasa, Kamboja 1a 6, Denpasar Bali. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April 2002 dengan bergerak dibidang jasa konsultasi teknik yang khusus menangani bidang penyelidikan tanah (*soil investigation & engineering*) dimana telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. CV. Prema Desain mempunyai tenaga kerja berjumlah 28 orang. CV. Prema Desain menerima surat pada 9 Agustus 2023 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang berisi permintaan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak (SP2DK) terkait dengan beberapa

Menurut Villos (2011), *tax review* adalah prosedur untuk memeriksa setiap transaksi wajib pajak guna mengetahui berapa besar pajak yang seharusnya terutang dan berapa besar pajak yang seharusnya timbul dari setiap transaksi wajib pajak. Penilaian kewajiban pajak wajib pajak adalah tujuan utama dari proses pemeriksaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang bertujuan untuk memastikan apakah wajib pajak telah mematuhi peraturan perpajakan atau tidak (Sumarsan, 2015). Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian *tax review* pada CV. Prema Desain dengan judul “*Analisis Tax Review Atas Surat Pemberitahuan Tahunan CV. Prema Desain Tahun Pajak 2023*” untuk mengetahui apakah terdapat potensi pajak yang belum dibayarkan serta apakah proses pembuatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa dan tahunan ditahun berikutnya sudah mengikuti peraturan perpajakan.

Oktaviani dan Apriliawati (2021) berjudul Pelaksanaan Tax Review Pajak Penghasilan PT Kharisma Barokah Muliatama sebagai Strategi Perencanaan Perpajakan dengan hasil perusahaan belum melaksanakan pembukuan secara optimal. Ini dikarenakan tidak semua biaya yang dilaporkan akurat. PT. Kharisma Barokah Muliatama hanya mencatat biaya-biaya yang diestimasikan setiap kali keluar. Biaya yang seharusnya didokumentasikan tetapi tidak tercatat dalam pembukuan bisa saja ada. Di sisi lain, PT. Kharisma Barokah Muliatama telah mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku terkait penyeteroran dan pelaporan.

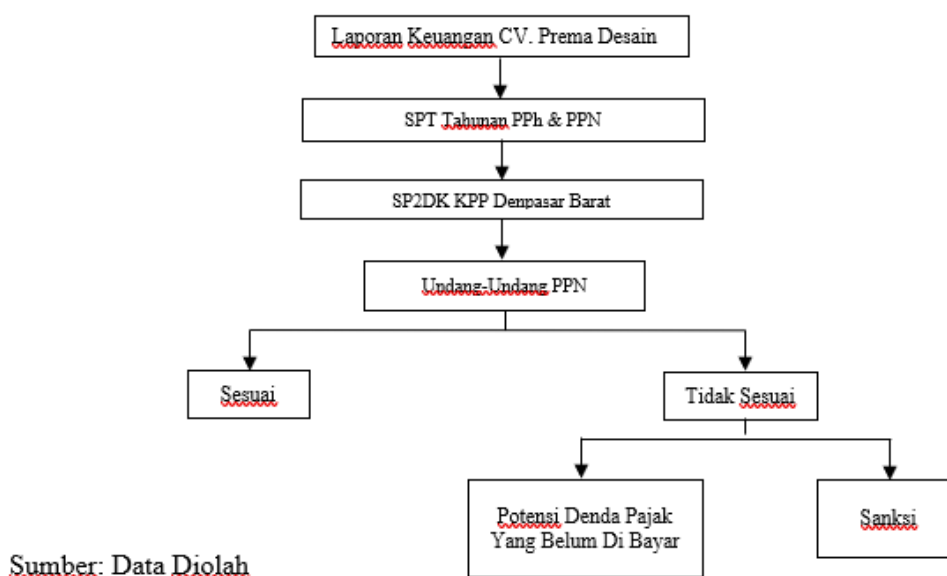
172 | Hita Akuntansi dan Keuangan

Utari dan Malini (2021) berjudul Tinjauan Analisis Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alat untuk Menilai Kewajiban Kontinjensi di RSIA XYZ. Dengan hasil bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku tidak dipatuhi dalam Tinjauan Pelaksanaan PPN di RSIA XYZ. Berdasarkan temuan kajian, RSIA XYZ secara formal telah mematuhi peraturan perpajakan dengan memakai

PPN atas objek pajak dan mewajibkan tarif dan pelaporan pajak. Namun, kepatuhan material RSIA XYZ terhadap setoran tidak memadai untuk pembayaran pajak pertambahan nilai. Ini didasarkan pada fakta bahwa PPN yang belum dibayar mencegah pembayaran PPN dilakukan selama Periode Desember 2019, sehingga terjadi kelebihan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Periode Desember. Karena kesalahan perhitungan, RSIA XYZ menyetor kekurangan pembayaran PPN dan melaporkan SPT PPN 1 yang Dikoreksi.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu data yang berupa bahasa lisan atau tulisan, perilaku, peristiwa, fenomena, pengetahuan, dan objek penelitian. Untuk mengkaji peristiwa kewajiban perpajakan CV. Prema Desain terkait dengan pembayaran PPN dan kewajiban pajak penghasilan badan, tujuan riset ini guna mengetahui omzet usaha yang tercatat dalam satu tahun pajak dengan melihat laporan keuangan fiskal dan komersial serta SPT Masa PPN. Gambar 3.1 menunjukkan kerangka konseptual untuk desain penelitian;



Gambar 1. Kerangka Konseptual Desain Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2024

Analisis data yaitu proses mengelompokkan, mengkarakterisasi, mensintesis, menyusun pola, menentukan yang signifikan, dan menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami. Informasi dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, menurut Miles dan Huberman (1987).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu cara untuk menilai tingkat keseimbangan dan kesesuaian satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang terkait yaitu pemerataan pajak. Hubungan antara jenis pajak dalam Pemerataan Pajak, baik sebagian maupun seluruhnya, ialah komponen laporan pajak yang menjadi bagian dari laporan pajak terkait. Dengan kata lain, pemerataan pajak merupakan cara untuk menyesuaikan pajak yang terkait dengan transaksi yang melibatkan komponen pajak. Prosedur penyetaraan Biaya/Penghasilan yang dapat dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke Kantor Pajak dengan Biaya/Penghasilan (Objek Pajak) yang dapat didokumentasikan dalam laporan keuangan disebut pemerataan. Oleh karenanya, pemerataan sangat penting guna menyelesaikan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan Badan dengan benar (Sigit, 2017).

PPh Pasal 21 adalah salah satu bentuk pemungutan pajak yang dikenakan kepada individu yang merupakan Subjek Pajak dalam negeri. Pajak ini mencakup berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Dasar PPh 21 Indonesia yang terbaru ialah Peraturan No.PER-32/PJ/2015 yang disahkan pada bulan Juni 2016 dan mengatur penyesuaian terhadap PTKP. Berikut Ekualisasi

Tabel 4.1 Ekualisasi SPT Masa PPh21 dengan Laporan Keuangan Tahun 2023

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

CV. Prema Desain telah melakukan pencatatan SPT PPh 21 secara tepat dan benar sesuai ketentuan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Ini dibuktikan dengan pemerataan SPT PPh Pasal 21 tahun 2023 yang tidak berdampak.

Tarif PPN resmi telah naik menjadi 11% dan 12% dalam UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan DPR. Tarif PPN sebelumnya hanya 10%. Kenaikan ini akan mulai berlaku pada tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN dalam RUU HPP sebagai bagian dari reformasi UU Perpajakan tengah dilakukan. Tarif pajak pertambahan nilai direncanakan dinaikkan secara bertahap dari 11% menjadi 12%, padahal dalam UU PPN hanya mengatur kisaran tarif pemungutan PPN maksimal 15%. Untuk menetapkan tarif baru ini, diperlukan pengaturan lebih lanjut. Tujuan pemungutan PPN sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPN mencakup beberapa aspek yakni pemanfaatan BKP, ekspor BKP, penyerahan dan impor BKP memastikan transaksi perdagangan dikenakan pajak yang adil.

176 | Hita Akuntansi dan Keuangan

Tabel 4.2 Ekualisasi Masa SPT PPN dengan Laporan Keuangan Tahun 2023

No	DPP Menurut	DPP Dalam Laporan Keuangan		Selisih
	SPT PPh 4(2)	Pendapatan	Sewa	
1.	471.437.838,00	471.437.838,00	-	-

Sumber: Data diolah, 2024

Dari hasil ekualisasi laporan keuangan CV. Prema Desain dengan adanya biaya yang terdokumentasi dalam laporan keuangan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2023, maka tidak ada perbedaan jumlah biaya yang seharusnya dicakup dalam SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN.

***Tax Review* Koreksi Fiskal dan Perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa CV.
Prema Desain Tahun 2023**

Koreksi fiskal yaitu tugas yang dilakukan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari prosedur pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian. Ketidaksesuaian dapat terjadi antara laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan sistem fiskal, maka WP melakukan pencocokan laporan keuangannya pada tahap ini. Tujuan dari laporan keuangan komersial adalah untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan kinerja ekonomi organisasi secara keseluruhan. Laporan keuangan dari sistem fiskal beroperasi dalam kaitannya dengan hubungan perpajakan untuk sementara waktu. Mengetahui kebijakan anggaran seseorang diperlukan sebelum melakukan koreksi apa pun. Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditetapkan dengan memakai hasil penyesuaian koreksi fiskal sebagai pedoman dalam mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia dikenakan berbagai pajak, ini mencakup PPh 21, PPh Pasal 22, 23, 25, PPh 4 Ayat 2 (final), PPh 26, serta PPN dan PPnBM. UU No. 36 Tahun 2009 mengatur dua jenis koreksi fiskal: negatif, yang mengurangi laba kena pajak atau PPh terutang, dan positif, yang biasanya disebabkan oleh biaya yang tidak diakui pajak menurut Pasal 9 UU Pajak Penghasilan. Ini dikarenakan biaya komersial lebih rendah daripada biaya fiskal dan penghasilan lebih besar daripada penghasilan fiskal. Penghasilan dari kegiatan usaha yang bukan merupakan objek kena pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh final merupakan contoh penyesuaian negatif (Pasal 4 ayat 2 UU PPh). Omzet kotor laporan pajak penghasilan badan

Tabel 4.3 Tabel Rekonsiliasi Fiskal Cv. Prema Desain Tahun Pajak 2023
Menurut Perusahaan

178 | Hita Akuntansi dan Keuangan

Total Umum Administrasi	Beban dan Rugi	21.997.910			
Laba Setelah Pajak		105,441,396	94,540,442	-	199.981.838,00
PPh Terhutang					21.997.910

Sumber: CV. Prema Desain, 2024

Dari hasil rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan terlihat sudah dilakukan koreksi fiskal positif terhadap beberapa biaya yang dilaporkan secara berlebih yakni terkait dengan beban gaji, beban sanksi pajak, dan beban pajak PPh 29. Untuk memastikan apakah koreksi yang dilakukan perusahaan sudah benar maka peneliti juga membuat rekonsiliasi fiskal yang disesuaikan dengan aturan perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tabel Rekonsiliasi Fiskal CV. Prema Desain Tahun Pajak 2023
Menurut Peneliti

Deskripsi	Komersial	Penyesuaian Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha	471.437.838,00			471.437.838,00
Beban umum Perusahaan				
Beban Gaji	292.330.000,00	49.660.000,00		242.670.000,00
Beban Listrik dan air	6.936.000,00			6.936.000,00
Beban Internet dan telepon	5.400.000,00			5.400.000,00
Beban Kebersihan	1.500.000,00			1.500.000,00
Beban Konsumsi	1.200.000,00			1.200.000,00
Beban Sanksi Pajak	22.882.532,00	22.882.532,00		-
Beban Penyusutan	13.750.000,00			13.750.000,00
Jumlah Biaya Operasional	343.998.532,00		-	271.456.000,00
Laba Rugi	127.439.306,00			199.981.838,00
PPh Terhutang				21.997.910

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasar Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 koreksi fiskal yang dibuat perusahaan dengan penelitian menghasilkan nilai yang sama dengan perbandingan yakni:

Tabel 4.5 Perbandingan Rekonsiliasi Fiskal

No	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Peneliti	Selisih
----	------------	--------------------	------------------	---------

	Penghasilan Fiskal	Netto			
1			199.981.838	199.981.838	-
2	PPh Terhutang		21.997.910	21.997.910	-
3	Kredit Pajak		5.763.856	5.763.856	0
4	PPh Kurang Bayar		16.234.054	16.234.054	-
5	Sanksi				-
6	Potensi Pajak Yang Masih Dibayar				-

Sumber: Data diolah, 2024

Dari laporan laba rugi CV. Prema Desain periode 1 Januari 2023-31 Desember 2023, terlihat tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan koreksi fiskal, baik positif maupun negatif. Ini dikarenakan PSAK 46 dan UU PPh dianut dalam seluruh perhitungan dan pengukuran koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif yang terdapat pada CV. Prema Desain ada tiga, yaitu, pada beban gaji yang dimana terjadi kelebihan pelaporan sebesar Rp. 49.660.000, beban sanksi pajak, dan beban pajak PPh 29.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil riset ini menghasilkan kesimpulan bahwa CV. Prema Desain telah melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPN secara tepat dan benar sesuai ketentuan. Hal ini dibuktikan dengan ekualisasi PPN tahun 2023 dan PPh pasal 21 yang tidak menimbulkan selisih. Selain itu, berdasar temuan pemeriksaan pajak laporan laba rugi, perusahaan mungkin ingin mempertimbangkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah agar wajib pajak dapat sepenuhnya merealisasikan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus melakukan pemeriksaan pajak secara berkala atau teratur. Koreksi fiskal positif yang terdapat pada CV. Prema Desain ada tiga, yaitu, pada beban gaji yang dimana terjadi kelebihan pelaporan sebesar Rp. 49.660.000, beban sanksi pajak, dan beban pajak PPh 29. Agar wajib pajak terhindar dari sanksi administratif dan menjadi subjek pemeriksaan otoritas pajak, ini dapat menjadi salah satu upaya mereka. Temuan laporan akhir ini dapat menjadi peta jalan untuk meningkatkan fitur terkait pajak, memungkinkan wajib pajak guna mematuhi persyaratan hukum dan membayar pajak tepat waktu. Kesalahan dalam pencatatan transaksi bisnis dan ketidakakuratan dalam perhitungan pajak dan akuntansi yang mengakibatkan objek pajak tidak dipotong dapat menjadi panduan untuk membuat laporan dan rekonsiliasi yang lebih tepat.

Daftar Pustaka

- 181 | Hita Akuntansi dan Keuangan

- 182 | Hita_Akuntansi dan Keuangan